



**PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus Kepolisian Resort Kerinci)

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Hukum

Oleh :

Irsal Sumitro

2320112009

Pembimbing:

Dr. Yoserwan S.H., M.H., LL.M

Dr. Nani Mulyati S.H., M.CL

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

# **PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

## **(Studi Kasus Kepolisian Resort Kerinci)**

( Irsal Sumitro, BP. 2320112009, 88 Halaman, Program studi magister ilmu hukum universitas andalas, 2025 )

### **ABSTRAK**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyababkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan peran besar kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polres Kerinci sebagai bagian dari institusi kepolisian memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar aparat, serta adanya indikasi intervensi eksternal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci? (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci? (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara kepada aparat penyidik Polres Kerinci dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahapan penyidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta tidak kooperatifnya pelaku dan saksi dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, menjalin kerja sama lintas sektor, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyidikan. Saran Melalui sistem koordinasi terpadu dan evaluasi rutin, proses penyidikan diharapkan tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga mampu memulihkan pelaku ke dalam kehidupan sosial secara sehat dan produktif.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Penyidikan, Narkotika*

## **LAW ENFORCEMENT AT THE INVESTIGATION STAGE AGAINST DRUG ABUSE CRIMINAL ACTS (Case Study of Kerinci Resort Police)**

(Irsal Sumitro, BP. 2320112009, 88 Pages, Master of Law Study Program, Andalas University, 2025)

### **ABSTRACT**

Narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain sensation, and cause dependence. Law enforcement against narcotics crimes is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which gives a major role to the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police (Polri). The Kerinci Police as part of the police institution has the responsibility to eradicate narcotics in its jurisdiction. However, in its implementation, the investigation process still faces various obstacles, including limited resources, weak coordination between officers, and indications of external intervention. The formulation of the problem in this study includes: (1) How is law enforcement at the investigation stage of drug abuse crimes at the Kerinci Police Resort? (2) What are the obstacles faced in law enforcement at the investigation stage of drug abuse crimes at the Kerinci Police Resort? (3) What efforts are made to overcome obstacles in law enforcement at the investigation stage of drug abuse crimes at the Kerinci Police Resort? The method used in this study is an empirical legal approach, with primary data obtained through interviews with investigators at the Kerinci Police Resort and secondary data obtained from studies of legal documents and related literature. The results of the study indicate that law enforcement at the investigation stage has been carried out in accordance with applicable legal procedures, but there are still a number of obstacles, including limited human resources, lack of facilities and infrastructure, and the uncooperativeness of perpetrators and witnesses in the investigation process. To overcome these obstacles, the police have made various efforts such as increasing the capacity of investigators through training, establishing cross-sector cooperation, and utilizing information technology in the investigation process. Suggestion Through an integrated coordination system and routine evaluation, the investigation process is expected to not only be oriented towards a deterrent effect, but also be able to restore the perpetrator to a healthy and productive social life.

**Keywords:** Law Enforcement, Investigation, Narcotics crime